

**LEGAL PROTECTION TOWARD AIRLINE PASSENGER
AGAINST STANDARD CLAUSE IN VIEW OF THE LAW
NUMBER 8 YEAR 1999 REGARDING CONSUMER
PROTECTION (STUDY OF AIRLINE
TICKET OF AIR ASIA)**

Hilda Adinta Wulandari

Abstract

The legal protection for consumers get concern in many aspects of life, especially in the case of a loss. The such losses due to the lack of protection of the legal entity that protects the rights of consumers who feel aggrieved. The issue of Ministerial Decree Number 81 Year 2004 on The Management of Air Transport has pushed the growth of air transport firm in Indonesia. But unfortunately it does not match the growth in service quality improvement. in fact, in flight activities are passenger rights are not being met and are not appropriate by the airline as the case of cancellation and / or flight delays. Based on these events, in order to protect the interests of passengers, then inserted into an agreement with the standard clause on each flight tickets. The Law Number 8 Year 1999 regarding Consumer Protection (UUPK) Article 18 paragraph 1 letter a has mentioned that it is prohibited to include standard clauses relating to the transfer of responsibility. The government's role is very important to supervise employers in offering goods and / or services produced that the government to review the existing regulations to run with responsibility although compensation has been given to passengers. There are no consequences to airline if is not running rules and make improvements in the manufacture of standard clauses ticket with respect to transfer of responsibility.

Keyword : Legal Protection, Standard Clause Ticket, Passengers

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG TRANSPORTASI UDARA TERHADAP KLAUSULA BAKU PADA TIKET PENERBANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI TENTANG TIKET AIR ASIA)

Hilda Adinta Wulandari

Abstrak

Perlindungan hukum bagi konsumen mendapatkan perhatian dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam hal kerugian. Kerugian tersebut karena kurangnya perlindungan dari badan hukum yang melindungi hak-hak konsumen yang merasa dirugikan. Penerbitan Keputusan Menteri Nomor 81 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara telah mendorong pertumbuhan perusahaan transportasi udara di Indonesia. Namun, sayangnya hal itu tidak sesuai dengan pertumbuhan peningkatan kualitas pelayanan. pada kenyataannya, dalam penyelenggaraan penerbangan terdapat hak penumpang yang tidak terpenuhi sebagaimana mestinya pelayanan maskapai sebagai kasus pembatalan dan / atau penundaan penerbangan. Berdasarkan kejadian ini, dalam rangka melindungi kepentingan penumpang, kemudian dimasukkan ke dalam perjanjian dengan klausula baku pada setiap tiket pesawat. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 18 ayat 1 huruf a menyebutkan bahwa dilarang untuk memasukkan klausul standar yang berkaitan dengan pengalihan tanggung jawab. Peran pemerintah sangat penting untuk mengawasi pengusaha dalam menawarkan barang dan / atau jasa yang dihasilkan pemerintah untuk meninjau peraturan yang ada untuk menjalankan tanggung jawab meskipun kompensasi telah diberikan kepada penumpang. Tidak ada konsekuensi untuk maskapai penerbangan apabila tidak menjalankan aturan dan melakukan perbaikan dalam pembuatan klausula baku pada tiket pesawat sehubungan dengan pengalihan tanggung jawab.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tiket Klausula Baku, Penumpang.